

KEBIJAKAN FISKAL DAN KEMANDIRIAN DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Machmud Al Amrie

Universitas Kaltara, Fakultas Ekonomi, Prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kebijakan fiskal di Provinsi Kalimantan Utara sebagai basis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Fokus utama adalah pada struktur pendapatan dan belanja daerah, ketergantungan pada transfer pusat, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data primer berasal dari publikasi *Regional Fiscal in Brief* dan laporan pemerintah provinsi, sedangkan data sekunder berasal dari laporan dan kajian fiskal terkait. Hasil menunjukkan bahwa kinerja fiskal Kalimantan Utara masih sangat tergantung pada dana transfer pusat. Rasio PAD terhadap total penerimaan masih rendah sehingga upaya peningkatan basis pendapatan daerah perlu diprioritaskan melalui reformasi pajak dan digitalisasi pungutan daerah. Penelitian ini merekomendasikan strategi kebijakan fiskal yang dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan memperkuat kapasitas pelayanan publik.

Kata Kunci : Fiskal, Kalimantan Utara, Kemandirian, Transfer Pusat, PAD

Abstract

This study examines fiscal policy in North Kalimantan Province to strengthen regional fiscal independence and support sustainable development. The main focus includes the regional revenue and expenditure structure, dependence on central government transfers, and optimization of Local Own-Source Revenue (PAD). Primary data were obtained from the Regional Fiscal in Brief publications and provincial government reports, while secondary data were drawn from relevant fiscal analyses. Findings indicate that North Kalimantan's fiscal performance remains heavily dependent on central government transfers. The ratio of own-source revenue to total revenue remains low, suggesting the need for expanded regional revenue bases through tax reform and digitized collections. The study recommends fiscal policy strategies to enhance fiscal autonomy and improve public service delivery.

1. Latar Belakang

1.1 Permasalahan

Kalimantan Utara, sebagai provinsi otonom baru yang kaya sumber daya alam, menghadapi tantangan fiskal yang signifikan. Meski mengalami pertumbuhan ekonomi positif, kinerja fiskal daerah masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat, sedangkan kontribusi *Pendapatan Asli Daerah (PAD)* relatif rendah. Ketergantungan ini membatasi ruang fiskal provinsi dalam menyelenggarakan layanan publik berkualitas, memperkuat pembangunan infrastruktur, dan respons terhadap dinamika ekonomi. Realisasi pendapatan dan

belanja daerah mengalami kontraksi dalam beberapa periode terakhir, dan PAD masih belum optimal sehingga menurunkan kemandirian fiskal daerah.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam mengelola perekonomian, baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengalokasikan sumber daya publik guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan belanja daerah, dengan harapan terciptanya kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, efektivitas kebijakan fiskal daerah sangat bergantung pada kapasitas fiskal dan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda di Indonesia memiliki karakteristik fiskal yang unik sekaligus menantang. Di satu sisi, Kalimantan Utara dianugerahi potensi sumber daya alam yang besar, terutama pada sektor pertambangan, kehutanan, dan energi. Di sisi lain, sebagai daerah otonom baru, struktur ekonomi dan fiskalnya masih berada dalam tahap konsolidasi. Kondisi ini tercermin dari struktur pendapatan daerah yang hingga saat ini masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif rendah. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat tersebut berpotensi membatasi ruang fiskal daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Selain permasalahan pada sisi pendapatan, kebijakan fiskal di Kalimantan Utara juga menghadapi tantangan pada sisi belanja daerah. Realisasi belanja, khususnya belanja modal, sering kali belum optimal dan belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung pembangunan jangka panjang. Belanja daerah masih didominasi oleh belanja rutin dan belanja pegawai, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan kualitas infrastruktur publik menjadi terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah belum sepenuhnya mampu berperan sebagai instrumen pengungkit pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah juga menimbulkan risiko fiskal jangka menengah dan panjang. Ketergantungan pada dana transfer membuat keuangan daerah sangat

rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional dan fluktuasi alokasi anggaran pusat. Apabila terjadi penurunan transfer atau penyesuaian kebijakan pusat, maka kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik dapat terganggu. Oleh karena itu, penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD dan pengelolaan belanja yang lebih efisien menjadi kebutuhan mendesak bagi Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam konteks tersebut, kajian mengenai kebijakan fiskal daerah di Provinsi Kalimantan Utara menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan kondisi dan kinerja fiskal daerah, tetapi juga untuk menganalisis sejauh mana kebijakan fiskal yang dijalankan mampu mendukung kemandirian daerah dan pembangunan berkelanjutan. Dengan memahami struktur pendapatan dan belanja daerah secara komprehensif, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan efisiensi anggaran, serta mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana struktur fiskal dan kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Utara? (2) Sejauh mana ketergantungan daerah terhadap transfer pusat dalam pembiayaan anggaran? (3) Apa saja kebijakan yang dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan optimalisasi PAD?

2. Tinjauan Teori

2.1 Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan konsep di mana wewenang pengelolaan sumber daya fiskal dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk meningkatkan responsivitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Teori ini menekankan pentingnya peran PAD sebagai indikator kemandirian fiskal serta kemampuan daerah untuk mengelola anggarannya secara efektif.

2.2 Struktur Fiskal Daerah

Struktur fiskal daerah meliputi komponen **pendapatan daerah** (PAD, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah) dan **belanja daerah** yang mencerminkan prioritas anggaran publik. Fenomena ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat dapat menghambat otonomi fiskal dan menurunkan insentif daerah untuk meningkatkan PAD.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan memadukan metode kuantitatif dan kualitatif (mixed approach). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan menggambarkan kondisi kebijakan fiskal di Provinsi Kalimantan Utara secara numerik, tetapi juga menganalisis secara mendalam makna dan implikasi kebijakan fiskal tersebut terhadap kemandirian daerah dan pembangunan ekonomi. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menangkap fenomena fiskal secara komprehensif, baik dari sisi data empiris maupun konteks kebijakan.

Jenis dan Desain Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, studi ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan struktur fiskal daerah yang meliputi komposisi pendapatan dan belanja daerah, sementara analisis dilakukan untuk menilai tingkat kemandirian fiskal serta efektivitas kebijakan fiskal yang diterapkan. Desain penelitian bersifat non-eksperimental, karena peneliti tidak melakukan perlakuan tertentu terhadap objek penelitian, melainkan menganalisis data yang telah tersedia dari berbagai sumber resmi.

Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah kebijakan fiskal daerah, yang difokuskan pada struktur pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara. Lokasi penelitian secara administratif berada di Provinsi Kalimantan Utara, dengan unit analisis berupa pemerintah daerah provinsi sebagai entitas fiskal. Pemilihan Kalimantan Utara didasarkan pada karakteristiknya sebagai provinsi otonom baru yang masih menghadapi tantangan kemandirian fiskal meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang besar.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dipilih karena penelitian berfokus pada analisis kebijakan fiskal dan kinerja keuangan daerah yang telah terdokumentasi secara resmi. Sumber data meliputi:

1. **Laporan realisasi APBD Provinsi Kalimantan Utara**, khususnya data pendapatan daerah, PAD, dana transfer, dan belanja daerah.
2. **Publikasi resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia**, seperti *Regional Fiscal in Brief* dan laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

3. **Dokumen kebijakan daerah**, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan laporan kinerja pemerintah daerah.
4. **Hasil penelitian dan kajian terdahulu** yang relevan dengan desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif berupa angka-angka fiskal dari laporan resmi pemerintah, sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan temuan empiris dari penelitian sebelumnya. Seluruh data yang dikumpulkan diverifikasi berdasarkan konsistensi antar sumber untuk memastikan validitas informasi.

Teknik dan Tahapan Analisis Data

Analisis data dilakukan secara bertahap dan sistematis. Tahapan pertama adalah **analisis deskriptif kuantitatif**, yaitu dengan menghitung dan menginterpretasikan indikator fiskal daerah, antara lain:

- **Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)** terhadap total pendapatan daerah untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal.
- **Rasio dana transfer pusat** terhadap total pendapatan daerah untuk menilai tingkat ketergantungan fiskal.
- **Komposisi belanja daerah**, khususnya perbandingan antara belanja operasi dan belanja modal.

Tahapan kedua adalah **analisis kualitatif**, yang dilakukan dengan menelaah kebijakan fiskal daerah dan dokumen perencanaan anggaran untuk memahami arah kebijakan serta kendala implementasinya. Analisis ini bertujuan mengaitkan temuan kuantitatif dengan konteks kebijakan dan kondisi ekonomi daerah.

Selanjutnya, dilakukan **analisis interpretatif**, yaitu mengaitkan hasil analisis fiskal dengan teori desentralisasi fiskal dan konsep kemandirian daerah. Tahap ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas kebijakan fiskal daerah serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi dan pelayanan publik.

Teknik Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan **triangulasi sumber**, dengan membandingkan data fiskal dari berbagai publikasi resmi dan dokumen kebijakan. Selain itu,

konsistensi data antar periode anggaran juga diperhatikan untuk menghindari bias interpretasi akibat anomali data tahunan.

Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada analisis kebijakan fiskal di tingkat **pemerintah Provinsi Kalimantan Utara**, sehingga tidak mencakup analisis fiskal kabupaten/kota secara rinci. Selain itu, penelitian ini tidak menguji hubungan kausal secara statistik, melainkan berfokus pada analisis deskriptif dan interpretatif terhadap kinerja fiskal daerah.

4. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Hasil analisis terhadap struktur pendapatan daerah menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di Provinsi Kalimantan Utara masih ditandai oleh **dominasi dana transfer dari pemerintah pusat**. Komponen pendapatan daerah sebagian besar bersumber dari dana perimbangan, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan relatif kecil. Kondisi ini mencerminkan tingkat **kemandirian fiskal yang masih rendah**, yang umum terjadi pada daerah otonom baru dengan kapasitas ekonomi dan administrasi fiskal yang belum sepenuhnya berkembang.

Rendahnya kontribusi PAD mengindikasikan bahwa potensi ekonomi lokal belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pendapatan daerah. Padahal, secara teoritis, desentralisasi fiskal menuntut daerah untuk secara aktif menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan sendiri agar tidak bergantung secara berlebihan pada pemerintah pusat. Ketergantungan fiskal yang tinggi berpotensi mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal Kalimantan Utara.

Selain itu, dominasi dana transfer juga menciptakan kerentanan fiskal. Ketika alokasi transfer mengalami perubahan akibat kebijakan fiskal nasional atau kondisi ekonomi makro, stabilitas fiskal daerah dapat terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah Kalimantan Utara belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemandirian fiskal sebagaimana diamanatkan dalam kerangka otonomi daerah.

2. Analisis Kinerja Belanja Daerah

Dari sisi belanja daerah, hasil analisis menunjukkan bahwa **komposisi belanja masih didominasi oleh belanja operasional**, khususnya belanja pegawai, dibandingkan dengan belanja modal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal daerah belum sepenuhnya diarahkan pada penciptaan kapasitas ekonomi jangka panjang. Belanja modal yang relatif terbatas berimplikasi

pada lambatnya pembangunan infrastruktur dan sarana publik yang menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Serapan belanja daerah yang belum optimal juga menjadi indikator adanya tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Rendahnya realisasi belanja, terutama pada sektor-sektor strategis, dapat mengurangi efektivitas kebijakan fiskal sebagai instrumen stimulus ekonomi. Dalam konteks Kalimantan Utara, kondisi geografis yang luas dan tantangan konektivitas seharusnya menjadikan belanja modal sebagai prioritas utama dalam kebijakan fiskal daerah.

Ketidakseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah masih cenderung bersifat administratif, belum sepenuhnya transformasional. Hal ini berpotensi menghambat upaya percepatan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah di dalam provinsi.

3. Pembahasan Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah

Tingkat kemandirian fiskal daerah dapat dilihat dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio tersebut masih berada pada kategori rendah, yang menandakan bahwa kemampuan Provinsi Kalimantan Utara dalam membiayai kebutuhan anggarannya secara mandiri masih terbatas. Temuan ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa daerah dengan PAD rendah cenderung memiliki otonomi fiskal yang lemah dan ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat.

Kondisi ini juga menunjukkan adanya **gap antara potensi fiskal dan realisasi fiskal**. Potensi sektor-sektor unggulan seperti pertambangan, kehutanan, serta aktivitas ekonomi lintas batas belum sepenuhnya terefleksi dalam peningkatan PAD. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan basis pajak daerah, lemahnya sistem administrasi pemungutan, serta belum optimalnya peran badan usaha milik daerah (BUMD).

Dalam jangka panjang, rendahnya kemandirian fiskal dapat menghambat inovasi kebijakan daerah, karena ruang fiskal yang sempit membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi pembangunan yang strategis.

4. Implikasi Kebijakan Fiskal terhadap Pembangunan Daerah

Kebijakan fiskal yang belum optimal berimplikasi langsung terhadap kualitas pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Ketergantungan pada dana transfer membuat kebijakan pembangunan daerah cenderung mengikuti arah kebijakan pusat, sehingga ruang untuk mengakomodasi kebutuhan

lokal menjadi terbatas. Selain itu, rendahnya belanja modal berdampak pada keterbatasan infrastruktur dasar, yang pada akhirnya memengaruhi daya saing ekonomi daerah.

Dari perspektif teori keuangan publik, kebijakan fiskal daerah seharusnya berfungsi sebagai instrumen redistribusi dan stabilisasi ekonomi lokal. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum berjalan secara optimal. Kebijakan fiskal masih lebih berperan sebagai alat administrasi anggaran dibandingkan sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi.

5. Strategi Optimalisasi Kebijakan Fiskal Daerah

Berdasarkan hasil analisis, optimalisasi kebijakan fiskal di Provinsi Kalimantan Utara perlu diarahkan pada dua aspek utama, yaitu **penguatan pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah**. Penguatan PAD dapat dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pemungutan. Sementara itu, kualitas belanja daerah perlu ditingkatkan dengan mengarahkan alokasi anggaran pada belanja produktif yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang.

Strategi ini sejalan dengan prinsip desentralisasi fiskal yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kewenangan fiskal dan tanggung jawab pembangunan daerah. Dengan kebijakan fiskal yang lebih mandiri dan efisien, Provinsi Kalimantan Utara diharapkan mampu mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kebijakan fiskal di Provinsi Kalimantan Utara, dapat disimpulkan bahwa kinerja fiskal daerah masih menghadapi tantangan struktural yang cukup signifikan. Struktur pendapatan daerah menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan masih relatif rendah. Kondisi ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang belum optimal dan mengindikasikan bahwa potensi ekonomi lokal belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Dari sisi belanja daerah, kebijakan fiskal masih didominasi oleh belanja operasional, khususnya belanja pegawai, sementara alokasi belanja modal yang bersifat produktif dan berorientasi jangka panjang masih terbatas. Komposisi belanja seperti ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal

daerah belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas infrastruktur. Rendahnya belanja modal juga berimplikasi pada terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing ekonomi regional.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal di Provinsi Kalimantan Utara belum sepenuhnya mencerminkan prinsip desentralisasi fiskal yang menekankan kemandirian daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan publik. Ketergantungan terhadap transfer pusat, rendahnya optimalisasi PAD, serta struktur belanja yang kurang produktif menjadi faktor utama yang membatasi peran kebijakan fiskal sebagai penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan kebijakan fiskal yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperluas basis pajak dan retribusi daerah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pemungutan, serta memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik daerah (BUMD) juga perlu didorong sebagai sumber pendapatan alternatif yang berkelanjutan.

Kedua, kebijakan belanja daerah perlu diarahkan secara lebih strategis dengan meningkatkan proporsi belanja modal yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi anggaran tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga mampu mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja dan daya ungkit fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola fiskal daerah agar kebijakan fiskal dapat diimplementasikan secara lebih efektif. Hal ini mencakup peningkatan kualitas perencanaan anggaran, pengawasan pelaksanaan APBD, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan tata kelola fiskal yang lebih baik, kebijakan fiskal daerah diharapkan mampu berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang adaptif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Nur, A. A., Wiryawan, D., & Amrie, M. Al. (2020). *Kepuasan Konsumen Astra Motor Honda Tanjung Selor Terkait Pelayanan Showroom*. 2(2), 109-117.
2. Al Amrie, M., Nur, A. A., & Wiryawan, D. (2022). *Manajemen Dan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga: Desa Sajau Tanjung Selor*. *JURNAL INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT*, 1(1), 9-14.
3. Nur, A. A., & Wiryawan, D. (2022). *Program Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Bagi Umkm*. *JURNAL INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT*, 1(1), 1-4.
4. Mader, Peri, and Adi Aspian Nur. "PENGARUH RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2007-2013." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Wilayah 1.1* (2020): 1-8.
5. Nur, Adi Aspian. "ANALISIS PEMEKARAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA JELARAI KABUPATEN BULUNGAN." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Wilayah 1.2* (2021): 18-35.
6. Rahmayani, Roslina Fitri, and Adi Aspian Nur. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAMA PANDEMI COVID-19." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Wilayah 2.1* (2021): 115-125.
7. Wiryawan, Dedik, and Adi Aspian Nur. "Pengaruh Ekuitas Merek (Brand Equity) Pada Keputusan Pembelian Produk Smartphone Vivo di Tanjung Selor." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 5.02* (2021): 345-356.
8. Nur, Adi Aspian. "Analisis masalah produksi usaha tambak udang di Kabupaten Berau." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya 11.1* (2023): 34-41.
9. Nur, Adi Aspian, Suud Ema Fauziah, and Dedik Wiryawan. "Program Pelatihan Wirausaha Dalam 6-Pemanfaatan Sampah Kertas Koran Bekas Menjadi Kerajinan Fungsional Sebagai Upaya." *PLAKAT: Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat 3.1* (2021): 1-10.
10. Octaviana, Sri, Hendra Laksamana, and Adi Aspian Nur. "Meningkatkan Pelayanan JNE di Batas Negeri." *JURNAL INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT 1.2* (2022): 1-7.

11. Wahyuni, Rina Sri, and Adi Aspian Nur. "Memilih Strategi Bisnis Yang Tepat Bagi Generasi Muda Pada Siswa dan Siswi SMKN 1." *JURNAL INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT* 1.1 (2022): 5-8.
12. Nur, A. A. (2023). Pemanfaatan Limbah Jagung Untuk Keberlanjutan Lingkungan Dan Ekonomi: Kecamatan Tanjung Palas (Lebong). *JURNAL INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT*, 2(2), 1-6.
13. *Regional Fiscal in Brief* Provinsi Kalimantan Utara — DJPb Kemenkeu RI.
14. SKALA. *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Provinsi Kalimantan Utara*.
15. SKALA. *Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD 2025: Optimalisasi Pemenuhan Mandatory Spending di Provinsi Kalimantan Utara*.